

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran tidak langsung yang meliputi belanja operasi dan pengeluaran langsung yang meliputi belanja modal. Agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan maka pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD terdiri dari penerimaan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatn asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Belanja langsung merupakan belanja modal atau investasi berupa pengadaan sarana yang bersifat peningkatan produksi, belanja tidak langsung ini dibagi menurut bidang – bidang membentuk sub – sub sektor akan membuat program – program yang akan dilaksanakan berupa proyek – proyek pembangunan.

Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterkan masyarakat didaerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun.

Menurut keynes pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah ini dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran. Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rostow dalam jingnan, yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relative besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten Tanah Datar sebesar 4.844,42, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5.423,08, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6.084,97. Belanja pemerintah daerah tahun 2009 untuk belanja tidak langsung sebesar 517.194.347.262, untuk belanja langsung sebesar 86.597.958.759, tahun 2010 belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 585.938.599.967, untuk belanja langsung mengalami penurunan sebesar 40.916.943.448. Pada tahun 2011 belanja tidak langsung

mengalami penurunan sebesar 501.796.326.721, untuk belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 115.834.646.748.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dari penulis lebih lanjut ingin membahas sebuah laporan akhir yang berjudul **“Studi Tentang Pengeluaran Pemerintah (Belanja) dan Perekonomian di Kabupaten Tanah Datar”**

1.2 Rumusan Masalah

Maka masalah yang ingin diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan belanja tidak langsung terhadap PDRB di kabupaten tanah datar?
2. Bagaimana hubungan belanja langsung terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Datar ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah :

1. Dapat mengetahui hubungan belanja tidak langsung terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui hubungan belanja langsung terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Agar penulisan ini dapat terarah dan bahasanya lebih terperinci, maka penulis memberikan batasan pembahasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang hubungan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian di Kabupaten Tanah Datar.
2. Data yang digunakan adalah data pengeluaran pemerintah dan PDRB dari tahun 2003 – 2012.

1.5 Sistematika penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah , tujuan dan ruang lingkup kajian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, pengertian PDRB, klasifikasi PDRB, pengertian pengeluaran pemerintah dan teori pengeluaran pemerintah.

BAB III : GAMBARAN UMUM SERTA KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH DATAR

Gambaran umum berisi tentang letak dan kondisi wilayah, iklim, penduduk, serta sarana dan prasarana. Sedangkan kondisi perekonomian menggambarkan tentang struktur ekonomi, perkembangan ekonomi, PDRB perkapita.

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat tentang hubungan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini penulis mencoba mengambil pokok – pokok pilihan dari penulisan ini yang dituangkan dalam bentuk kumpulan dan penulis juga melakukan beberapa saran.